BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia sejak tahun 1990-an tumbuh pesat. Industri perbankan merupakan industri yang mengalami kemajuan yang paling pesat dibandingkan industri yang lainnya. Hal ini disebabkan deregulasi yang dilakukan pemerintah mengenai perbankan pada tahun 1983, deregulasi ini sangat mempengaruhi pola dan strategi perbankan baik dari sisi aktiva maupun pasiva perbankan itu sendiri. Situasi ini memaksa industri perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana. sehingga menyebabkan bisnis perbankan berkembang pesat dengan persaingan yang semakin ketat.

Pada umumnya kegiatan terbesar bank adalah dibidang perkreditan, sebagaimana yang tercantum dalam UU perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Oleh karena itu, bank menitikberatkan penyaluran dananya pada kegiatan kredit dan hal ini dapat dibuktikan dalam setiap neraca yang dipublikasikan. Bank dituntut untuk semakin kompetitif dalam menghimpun dana maupun dalam mengalokasikan dan terutama dalam hal pemberian kredit dimana bank dituntut untuk lebih selektif.

Jumlah kredit yang disalurkan oleh suatu bank selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka semakin banyak pula pendapatan (bunga/operasionalnya) yang diterima oleh bank. Pendapatan sebagian besar bank didominasi oleh pendapatan dari pemberian kredit, yaitu berupa bunga,provisi, *commitment fee* dan lainnya yang diterima bank sebagai akibat dari pemberian kredit, namun hal itu mengandung resiko ketidakpastian yang cukup tinggi sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban debitur untuk membayar bunga dan angsuran pokok bank. Dengan demikian kredit harus dikelola dengan baik mulai dari proses pemberian kredit sampai dengan kredit tersebut lunas, agar resiko-resiko tersebut dapat ditekan serendah mungkin.

Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua bank berlomba menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat bagi yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Karena bagi bank dana merupakan persoalan yang paling utama tanpa adanya dana bank tidak akan berfungsi sebagaimana layaknya.

Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, deposito, tabungan. Selain dari ketiga macam bentuk dana simpanan dari pihak ketiga tersebut yaitu giro, deposito, dan tabungan masih banyak terdapat dana dari pihak ketiga lainnya yang dapat diterima oleh bank. Akan tetapi, dana-dana ini sebagian besar berbentuk dana sementara yang sukar disusun perencanaannya karena bersifat sementara.

Krisis perbankan mulai dirasakan, pada pertengahan 1990-an masalah dunia perbankan diketahui dalam berbagai bentuknya seperti pelanggaran batas maksimum pemberian kredit sebagaimana yang terjadi pada bank-bank umum.

Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangnya. Laporan keuangan bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum, dan investor, mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan bank yang bersangkutan. Pengukuran tingkat kesehatan bank harus dilakukan oleh semua bank baik bank konvensional maupun bank syariah karena terkait dengan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, dan pihak lainnya. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Analisis laporan keuangan, khususnya mencurahkan perhatian kepada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan keuangan pada masa lalu,

sekarang dan memproyeksikan masa yang akan datang. Analisis rasional merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan keuangan. Dengan kata lain, diantara alat-alat analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi pasar dibidang keuangan, adalah analisis ratio. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia dan pengawasan perbankan nasional menentukan ketentuan modal minimum yang harus tersedia pada bank umum. Selain itu Bank Indonesia menetapkan juga ukuran kesehatan bank, yang dikenal dengan konteks CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning,* dan *Liquidity).* Jadi faktor permodalan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan operasi suatu bank secara sehat. Fungsi dari permodalan adalah sebagai ukuran kemampuan bank menyerap kerugian yang tidak dapat dihindarkan, sebagai dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dan sebagai alat pengukur kekayaan.

Bank memerlukan modal yang cukup untuk menutupi kerugian yang akan terjadi, dengan menggunakan alat pengukur *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Pada masa krisis moneter, umunya ada lima masalah besar yang dihadapi perbankan nasional salah satunya adalah masalah *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet. Masalah *Non Performing Loan* (NPL) tersebut merupakan tantangan besar bagi dunia perbankan. Apabila bank mamapu menekan rasio *Non Performing Loan* (NPL), maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan

semakin besar pula karena bank-bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membuat cadangan kerugian *Non Performing Loan* (NPL) atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dengan semakin kecil PPAP yang harus dibentuk bank, maka pengembalian modal bank yang diperoleh akan membaik dan keuntungan yang diperolehpun meningkat sehingga kinerja bank secara keseluruhan akan ikut membaik.

Pengembalian modal bank dari hasil kredit yang disalurkan kepada masyarakat sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh bank. Setiap perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Salah satu cara untuk menilai tingkat profitabilitas perbankan yang diukur dari pengembalian modal yaitu dengan mengukur rasio *Return On Equity* (ROE). Rasio ini menghubungkan keuntungan bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah modal yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut. *Return On Equity* (ROE) dapat diperoleh dengan membagi laba setalah pajak dengan total *equity* yang dimiliki perusahaan dikalikan 100%. Sehingga diperoleh seberapa besar keuntungan yang menjadi hak pemilik modal, dan seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan modal perusahaan.

Bank bjb yang dulu dikenal dengan Bank Jabar Banten adalah bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Maret 1961 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bank Pembangunan Daerah berkantor pusat di Bandung dengan aktivitas sebagai Bank Umum, sejak Tahun

1992 sesuai SK Direksi Bank Indonesia Nomor 25 / 84 / KEP / DIR / tanggal 2 November 1992 statusnya meningkat menjadi Bank Umum Devisa. Disamping itu Bank Pembangunan Jawa Barat mendapat sebutan / *call name* " Bank Jabar " dan logo baru berdasarkan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 1995.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998 tentang bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, maka melalui RUPS Luar Biasa di Bogor tanggal 20 November 1998 telah diputuskan untuk mengubah bentuk badan hukum Bank Jabar menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang kemudian disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 tanggal 14 November 1998, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.32.027 tanggal 13 Januari 1999 mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 ini untuk selanjutnya perusahaan ini diberi nama PT Bank Jabar.

Pendirian Bank Jabar ini berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 8 April 1999 yang dibuat oleh Notaris Ny. Popy Sutresna, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan Nomor C2–7103;HT.01.01.TH 1999 tanggal 16 April 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999.

Pada tahun 2000 Bank Jabar berpindah lokasi, yang pada mulanya berlokasi di jalan Braga No. 12 menjadi berlokasi di Jalan Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Sampai tahun 2005 saja. Bank Jabar sebagai sebuah bank daerah telah membuka kantor cabang di ibukota-ibukota propinsi lain seperti Surabaya, Semarang, dll. Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan

perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah..

Seiring dengan tuntutan era globalisasi, hal tersebut membuka peluang untuk lebih memperluas ruang gerak operasional sekaligus mengubah *image* Bank Jabar yang selama ini terbatas melayani masyarakat daerah propinsi Jawa Barat menjadi sebuah Bank berwawasan global, bardasarkan keputusan RUPS Bank Jabar bertambah lagi dengan masuknya Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah Propinsi Banten sebagai pemilik.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (*call name*) Bank Jabar Banten

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010, sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni

2010 perihal Rencana Perubahan Logo serta Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka perseroan telah resmi berubah menjadi bank bjb. Pada bulan Juli 2010, bank bjb menjadi BPD pertama di Indonesia yang melantai saham di Bursa Efek Indonesia

Tabel 1.1

Perkembangan CAR, NPL dan ROE
PT bank bjb Tbk.
Periode 2003-2010

Periode	CAR (%)	NPL (%)	ROE (%)
2003	13,5	0,36	19,12
2004	14,2	0,33	15,72
2005	14,8	0,46	16,51
2006	15,0	0,43	16,72
2007	16,8	0,72	17,29
2008	15,1	0,82	22,39
2009	21,2	1,94	22,94
2010	22,8	1,76	22,30

Sumber : PT bank bjb Tbk

Perkembangan CAR pada bank bjb dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 cenderung meningkat, terjadi penurunan pada tahun 2008 menjadi 15,1% dari 16,8% pada tahun 2007,. Sebaliknya yang terjadi pada perkembangan NPL, NPL cenderung terus meningkat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Hal yang sama pun terjadi pada ROE yang perkembangannya terus meningkat namun menurun pada tahun 2010 menjadi 22,30% dari 22,94% pada tahun 2009. Terjadi fenomena pada tahun 2008 yaitu CAR menurun menjadi 15,1% dari 16,8% sedangkan NPL dan ROE meningkat yaitu 0,82% dan 22,39%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2008 terjadi krisis perbankan yang mengakibatkan bank bjb

kesulitan untuk mencari dana dari masyarakat, sedangkan setiap tahun bank bjb meningkatkan perluasan kredit. Menurut Rachmat Firdaus dan Maya ariyanti dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank Umum (2003 : 45) mengatakan bahwa :

> "Semakin besar kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula ATMR bank yang bersangkutan. Sehingga CAR akan menurun. Dengan demikian apabila bank akan mengadakan expansi/perluasan pemberian kredit, maka harus memperhatikan jumlah modal yang dimiliki saat itu, yang berarti apabila CARnya sudah mendekati ketentuan minimal, maka expansi kredit tersebut harus dibarengi dengan penambahan jumlah modal."

Berdasarkan teori tersebut di atas, pada tahun 2008 perluasan kredit yang dilakukan oleh bank bjb tidak diikuti dengan penambahan modal sehingga CAR menurun. Perluasan kredit juga mengakibatkan naiknya NPL dan naiknya ROE.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menalaah secara lebih mendalam, diharapkan dapat diketahui seberapa besar pengaruh CAR dan NPL memberikan dampak bagi ROE dalam bentuk penelitian yang berjudul **" Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT bank bjb Tbk,**

1.2. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terjadi penurunan CAR pada tahun 2007 dan 2008 yang dikarenakan semakin besar kredit yang disalurkan maka akan semakin besar ATMR sehingga CAR akan menurun dalam artian kenaikan pemberian kredit tidak dibarengi dengan penambahan modal. Sedangkan yang terjadi pada NPL yang terus meningkat dari tahun 2006 sampai dengan tahun

2010 diakibatkan karena nasabah tidak dapat mengembalikan kreditnya tepat waktu. Hal tersebut berpengaruh terhadap ROE yang juga mengalami kenaikan, hanya terjadi penurunan pada tahun 2010 yang diakibatkan NPL yang tinggi dibanding tahun sebelumnya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan *Capital Adequacy Ratio* pada PT bank bjb Tbk.
2. Bagaimana perkembangan *Non Performing Loan* pada PT bank bjb Tbk.
3. Bagaimana perkembangan *Return On Equity* pada PT bank bjb Tbk.
4. Seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Loan* terhadap ROE secara parsial dan simultan pada PT bank bjb Tbk.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Loan* terhadap *Return On Equity* pada PT bank bjb Tbk.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. *Capital Adequacy Ratio* pada PT bank bjb Tbk.
2. *Non Performing Loan* pada PT bank bjb Tbk.
3. *Return On Equity* pada PT bank bjb Tbk.
4. Besarnya pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Loan* terhadap *Return On Equity* secara parsial dan simultan pada PT bank bjb Tbk.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Loan* terhadap Return On Equity dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan.

1.4.2. Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Loan* terhadap Return On Equity pada PT bank bjb Tbk,

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya. Dengan masalah serupa mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Loan* terhadap Return On Equity pada PT bank bjb Tbk,

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT Bank bjb Tbk, dengan jangka waktu penelitian dari Maret sampai dengan Juni 2011.

Keterangan	Maret				April				Mei				Juni			
	Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pra Survey	■	■														
Usulan Penelitian			■	■												
Pengolahan Data					■	■										
Analisa Data							■	■								
Penyusunan Laporan									■	■	■	■	■	■	■	■